

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran secara umum merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu yang objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja.

Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik.

Menurut Degeng dalam Hamzah B.Uno (2009:3) pembelajaran “merupakan suatu disiplin ilmu menaruh perhatian pada perbaikan kualitas pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran deskriptif, sedangkan rancangan pembelajaran mendekati tujuan yang sama dengan menggunakan teori pembelajaran perskriptif”. Selanjutnya Sugandi (2000:25) menyatakan pembelajaran “merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja”. Selain itu menurut Wina Sanjaya (2005:18) pembelajaran “merupakan proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri maupun potensi yang ada di luar diri siswa sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu”. Selain itu juga menurut Surya (2004:11) pembelajaran “merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Pendapat lain dikemukakan Winkel pembelajaran “merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa”.

(Efendi, Definisi Pembelajaran 26 September 2012, 15:45<http://effendimdth.blogspot.com/2012/09/pengertian-belajar-menurut-para-ahli.html>).

Proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar dalam suasana interaksi edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, adanya interaksi yang telah dirancang untuk tujuan tertentu setidaknya merupakan pencapaian tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada kegiatan integralistik antara pendidikan dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran secara metodologis berakar dari pihak pendidik yaitu guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis dari pihak peserta didik.

UNESCO dalam Zaim Elmubarak (2004:41-42) merekomendasikan pembaharuan pendidikan dan pembelajaran pada lima konsep pokok paradigma pembelajaran dan pendidikan, sebagai berikut:

1. *Learning to know*

Peserta didik dimotivasi sehingga timbul kebutuhan dari dirinya sendiri untuk memperoleh informasi, sikap tertentu yang ingin dikuasai.

2. *Learning to do*

Peserta didik dilatih secara sadar mampu melakukan perbuatan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan pengendalian.

3. *Learning to live together*

Sekolah sebagai suatu masyarakat mini seharusnya mengajarkan “*cooperatif learning*”, kerja sama dan bersama-sama bukannya pertandingan intelektualistik semata yang hanya menjadikan

manusia pandai tetapi termakan kepandaian sendiri dan membodohi orang lain.

4. *Learning to be*

Peserta didik dikondisikan dalam suasana yang dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai kebebasan untuk mengekspresikan diri, sehingga dapat terus-menerus menemukan jati dirinya.

5. *Learning through life*

Pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pembelajaran dan pendidikan berjalan dengan seumur hidup.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ialah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya waktu. Dan pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal ini pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan sudah melalui tahapan rancangan pembelajaran.

1.2 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Hampir semua orang dikenai Pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab Pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima Pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa

dan mahasiswa dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan ialah khas dan alat manusia, tidak ada makhluk lain yang membutuhkan Pendidikan. Perlu ditekankan disini bahwa Pendidikan itu bukanlah sekadar membuat peserta didik menjadi sopan, taat, jujur, setia, hormat, sosial dan sebagainya. Tidak juga bermaksud hanya membuat mereka tahu Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu mengembangkannya. Marilah untuk lebih memahami istilah pendidikan di bawah ini ada beberapa definisi Pendidikan.

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “PIAS”, artinya anak, dan “AGAIN” diterjemahkan membimbing, jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 (2007:11) mendefinisikan:

“pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara”.

Definisi-definisi pendidikan yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan dan menumbuhkan bakat, pribadi, potensi-potensi lainnya secara optimal dalam diri anak kearah yang positif.

Kewarganegaraan berasal dari kata “*Civics*” yang secara etimologis berasal dari kata “*Civicus*” (bahasa latin) sedangkan dalam bahasa Inggris “*Citizens*” “didefinisikan sebagai warga negara, penduduk dari

sebuah kota, sesama warga negara, penduduk, orang setanah air bawahan atau kaula”.

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua istilah yaitu “*Civic Education*” dan “*Citizenship Education*” yang keduanya memiliki peranan masing-masing yang tetap saling berkaitan. *Civic Education* lebih pada suatu rancangan yang mempersiapkan warganegara muda, kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Sedangkan “*Citizenship Education*” adalah lebih pada pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai “*citizenship education*” secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 39 Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”.

Menurut Numan Somantri (2010:1) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

Program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006:11), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui:

1. *Civic Intellegence*

Yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.

2. *Civic Responsibility*

Yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

3. *Civic Participation*

Yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Pendapat Sumarsono (2002:6) menyatakan “Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali siswa dengan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan serta pendidikan pendahuluan bela negara, agar menjadi warga

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun Substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari:

1. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*)

Mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara rinci materi pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.

2. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*)

Meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta dan aktif mewujudkan masyarakat madani, proses pengambilan keputusan politik, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, mengelola konflik, keterampilan hidup dan sebagainya.

3. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*)

Mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma, dan nilai luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, perlindungan terhadap minoritas dan sebagainya.

Dimensi-dimensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat, karena pendidikan

kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peran penting dalam membentuk warga negara yang baik, berakhlak, dan bertanggung jawab sesuai dengan Falsafah dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat didefinisikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan mengenai hubungan antar warga negara, pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, kesadaran terhadap hukum dan politik sehingga tercipta suasana yang demokratis.

Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006:12), tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Beradaptasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat.
3. Bekembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri dan pribadi berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Pendapat M. Nasruddin Anshoriy (2008:209) menyatakan “Terbukti, bangsa yang berhasil mencapai tingkat kemajuan budaya dan teknologi tinggi harus didukung oleh kualitas pendidikan yang baik. Dalam konteks saat ini, jati diri dan kepribadian bangsa perlu dibentuk melalui pendidikan multikultural. Hal ini karena Indonesia dihuni oleh beragam agama, tradisi, dan budaya”.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan yakni menjadikan sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi untuk mengembangkan kepribadian siswa sebagai warga negara Indonesia dalam menerapkan ipteks dengan rasa tanggungjawab kemanusiaan. Misi Pendidikan Kewarganegaraan yakni membantu siswa agar mampu menanamkan nilai dasar, menjelaskan nilai dasar, mewujudkan nilai dasar dan memupuk nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasai dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Menurut Numan Sumantri (2001:166), fungsi Pendidikan Kewarganegaraan “adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya, yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang berdemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, termampil,

kreatif, inovatif serta mempunyai karakter yang khas dalam sikap dan moral serta berwawasan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang dilandasi dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan paradigma baru PKn, Depdiknas (2006:49) mengeluarkan standar isi materi PKn sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara serta sikap positif terhadap NKRI.
2. Norma, hukum dan persatuan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
 - a. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, persamaan kedudukan warga negara.
 - b. Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama serta konstitusi yang pernah ada di Indonesia.

- c. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintah daerah dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani serta sistem pemerintahan.
- d. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- e. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional serta mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan pengertian dari pembelajaran dan pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat diartikan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai masyarakat sekaligus sebagai warga negara yang baik serta berwawasan kebangsaan. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggalakkan kembali materi pelajaran wawasan dan kewarganegaraan di dalam sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara konseptual yang di tanamkan rasa kebangsaan yang dalam dan cinta tanah air dan bangsa yang mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian

yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Maraknya isu dari berbagai pihak yang menyoroti sistem penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat menghasilkan lulusan berkualitas, termasuk wawasan sikap dan perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan yang baik. Tuduhan akan rendahnya kualitas lulusan ini selalu saja mengarah pada kegagalan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai bukti dengan menunjukkan sikap dan perilaku tidak terpuji yang sedang merajalela, seperti perkelahian, penodong sampai penganiayaan dan pembunuhan, narkoba, penyelewengan seksual, dan perusakan lingkungan. Hal ini diperkuat dengan merajalelanya tindakan anarkis, maka semakin menguatkan kesan bahwa siswa yang bersikap dan berperilaku tidak terpuji dicap sebagai amoral dan asusila.

Berdasarkan orientasi pada hal tersebut, maka peran dan fungsi serta tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan sangat diharapkan untuk mau dan mampu menjadikan para siswa sebagai calon warga masyarakat sekaligus sebagai warga negarayang berwawasan kebangsaan. Adapun ciri-cirinya antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran, dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri, dan percaya diri, sederhana, terbuka, dan

pengertian terhadap kritik dan saran, patuh terhadap peraturan, kreatif dan inovatif.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu diorganisasikan antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung jawab individu yang mencakup menghormati kehidupan umat manusia, menghormati hak orang lain, toleransi, mengendalikan diri, partisipasi dalam proses demokrasi, bekerja untuk kepentingan umum.
2. Kemerdekaan individu untuk berpartisipasi dalam demokrasi, beribadah, berpikir, berkesadaran, berkumpul berserikat, mengemukakan pikiran.
3. Hak-hak individu yang mencakup hak hidup, kemerdekaan, harga diri, keamanan, persamaan kesempatan, keadilan, dan pemilikan kekayaan.
4. Kepercayaan mengenai kondisi masyarakat dan tanggung jawab pemerintah yang mencakup kebutuhan masyarakat akan hukum yang diterima secara umum, perlindungan terhadap minoritas, pemerintah yang dipilih oleh rakyat, pemerintah yang menghormati dan melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan individu, dan kemerdekaan yang bekerja untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan penerapan dari suatu teori pada kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan juga mengatur tanggung jawab individu terhadap dirinya, orang lain

dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya juga di atur tentang kemerdekaan tiap-tiap individu, hak-hak individu, serta pemerintah dan hubungan masyarakat dan pemerintah.

2. Media Massa

2.1 Pengertian Media Massa

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius*, yang secara harfiah berarti “tengah”, perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media massa dalam kamus lengkap bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut: media, sarana, alat atau sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, radio, telepon, internet, dan sebagainya media cetak, alat komunikasi massa yang diterbitkan dalam bentuk cetakan seperti koran, majalah dan sebagainya.

Susanto (1982:2) menyatakan bahwa media massa “adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak dan elektronik, sehingga pesan atau informasi yang sama dapat diterima secara serentak”.

AECT (Association of Education and Communication Technology, 1977), dalam Arsyad (2007:3), media massa “merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi”.

Menurut Hafied Cangara (2002:134) Media massa “merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada

khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, Radio, dan Televisi”. Sedangkan karakteristik Media Massa menurut Hafied Cangara (2002:134-135) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Komunikasi” adalah:

- a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
- c. Meluas dan serempak artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan, bergerak secara luas dan simultan dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar dan semacamnya
- e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa

Salah satu peralatan teknis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah surat kabar sebagai kelompok media massa cetak. Media massa cetak seperti surat kabar merupakan media massa tertua sebelum ditemukannya film, radio dan televisi.

Media massa cetak merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang sering disajikan untuk memberikan informasi bagi pembaca, ini berarti media massa cetak secara tidak langsung bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan massa, sedangkan fungsi komunikasi massa menurut Onong Uchjana Effendy dalam “Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek” mengatakan ada 3 macam yang meliputi:

1. Komunikasi massa berfungsi untuk menyiarkan informasi (*to inform*)
2. Komunikasi massa berfungsi untuk mendidik (*to educate*)
3. Komunikasi massa berfungsi untuk menghibur (*to entertain*), dan berfungsi dalam membimbing dan mengkritik. (Onong Uchjana Effendy, 1999:54)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di artikan media massa adalah media yang mampu menimbulkan keserempakan informasi diantara khalayak yang sedang memperhatikan pesan yang dilancarkan oleh media massa tersebut, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik.

Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan perdebatan panjang tentang makna dan dampak media massa pada perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan teori komunikasi massa, konsep masyarakat massa mendapat relasi kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan

dibentuk oleh budaya massa yang ada. Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia.

Menurut Werner Severin (2009:368) fungsi utama media massa “adalah untuk mengkomunikasikan kesemua manusia lainnya mengenai perilaku, perasaan, dan pemikiran mereka”. Dan dalam mewujudkan hal itu, pers tidak akan lepas dengan tanggung jawab dari kebenaran informasi (*Responsibility*), kebebasan insan pers dalam penyajian berita (*Freedom of the pers*), kebebasan pers dari tekanan-tekanan pihak lainnya (*Idependence*), kelayakan berita terkait dengan kebenaran dan keakuratannya (*Sincerity, Truthfulness, Accuracy*), aturan main yang disepakati bersama (*Fair Play*), dan penuh pertimbangan (*Decency*). Jadi intinya kebebasan pers sekarang ini dapat dilaksanakan dengan baik, jika kebebasan pers itu diimbangi dengan tanggung jawab dan kode etik sebagai landasan profesi, untuk menghindari ada pemberitaan yang menjurus anarkis.

2.2 Jenis-jenis Media Massa

Djamarah (2002:140), secara umum jenis-jenis media massa terdiri dua bagian, yaitu:

1. Media Cetak

Media Massa Cetak (*Printed Media*), dicetak dalam lembaran kertas.

Dari segi formatnya dan ukuran kertas, media cetak diantaranya terdiri dari:

a. Koran

Bervariasinya format serta isi surat kabar yang menyediakan rubrik hukum, politik, pendidikan, sosial dan budaya. Pada umumnya surat kabar, terutama yang terbit di Indonesia tidak terlalu tebal serta termasuk media yang sederhana, sehingga mudah digunakan.

Berdasarkan definisi mengenai koran atau surat kabar, dapat dipahami bahwa koran atau surat kabar yang ada di Indonesia, dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi siswa karena di dalam setiap edisi koran atau surat, tersedianya rubrik mengenai bidang hukum, politik, pendidikan, sosial dan budaya, yang berhubungan dengan materi yang diajarkan di sekolah.

b. Majalah

Majalah secara harfiah dalam bahasa Inggris berarti *magazine*, menurut Djafar H. Assegaff (1983:127) dalam bukunya *Jurnalistik Masa Kini*, majalah diartikan sebagai publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis.

Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subyek yang bervariasi. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik populer yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dan ditulis

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Penerbitan akademis yang menulis artikel yang dapat dengan ilmu tersebut publikasi ilmiah atau jurnal.

F. Frazier Bond, majalah dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Majalah Umum

Adalah majalah yang menggunakan persoalan-persoalan yang mempunyai arti penting bagi orang banyak. Menyangkut soal politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang meliputi kebutuhan manusia dalam masyarakat.

2. Majalah Khusus

Adalah majalah yang mengemukakan masalah pertanian, ekonomi, teknik, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

2. Media Elektronik

Media Massa Elektronik (*Elektronik Media*). Jenis media massa yang isinya disebar luaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektronik, yang terdiri dari:

a. Internet

Secara harfiah, internet (kependekan daripada kata 'inter-network' ialah rangkaian komputer yang terhubung menerusi beberapa rangkaian. Internet merupakan sistem komputer umum, yang terhubung secara global sebagai protokol

pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking guna dari Internet yaitu bisa mencari semua informasi, hiburan, maupun berita aktual dan lainnya.

b. Televisi

Televisi merupakan sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata *tele* dan *vision*; yang mempunyai arti masing-masing jauh (*tele*) dan tampak (*vision*). Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia.

Azhar Arsyad (2007:51), televisi “adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Televisi dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, yang sangat mudah dijangkau melalui siaran udara”. ”Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 menyebutkan: “ Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk gambar dan suara secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.

c. Radio

Radio merupakan alat penyampaian informasi yang bersifat audio dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300Ghz (panjang gelombang lebih besar dari 1 mm) dengan menggunakan bahasa lisan sebagai penghubung atau informasi melalui pengiriman suara atau bunyi yang disampaikan lewat udara kepada khalayak pendengar, sehingga pendengar, sehingga pendengar merasa tertarik akan pesan yang disampaikan dan kemudian mengikuti dan pelaksanaan pesan yang dianjurkan melalui siaran tersebut.

2.3 Fungsi Media Massa

Media massa sendiri dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi atau peran sosial, yaitu:

a. Fungsi Pengawasan

Salah satu fungsi komunikasi massa adalah sebagai pengawasan, karena dengan pengawasan ini akan lebih mempermudah pengontrolan kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi didalam masyarakat. Dalam membentuk fungsi ini, media sering kali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya atau ancaman militer.

b. Fungsi Pendidikan

Media massa atau pers itu sebagai sarana pendidikan massa, pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

c. Fungsi Kontrol Sosial

Melalui fungsi media massa ini, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) *Social Participation* (keikutsertaan dalam pemerintahan)
- b) *Social responsibility* (pertanggungjawaban pemerintahan terhadap masyarakat)
- c) *Social support* (dukungan rakyat terhadap pemerintah)
- d) *Social control* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan)

d. Fungsi Pencerahan Informasi

Dengan adanya media massa, masyarakat akan lebih mudah mencari dan mendapat informasi. Karena fungsi utama dari media massa adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menyangkut berbagai hal, baik dalam ekonomi, politik, agama, hukum dan budaya.

e. Fungsi Transformasi Budaya

Dalam keterkaitannya dengan budaya, media massa memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat. Karena dari media massa, masyarakat dapat belajar berbagai macam hal. Misal dalam hal kebudayaan, dari siaran atau tayangan televisi, masyarakat dapat belajar tentang budaya yang bersifat tradisional dan modern, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Meningkatkan kesatuan sosial, memperluas dasar pengalaman bersama.

f. Fungsi Hiburan

Fungsi media untuk menghibur manusia. Manusia cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. Rihat pribadi, mengisi waktu luang.

3. Wawasan Kebangsaan

3.1 Pengertian Wawasan Kebangsaan

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia.

Wawasan merupakan cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengepresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara itu adalah: wadah, isi, dan tata laku.

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya manusia (SDM). Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman

masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitar (regional atau internasional). Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara disebut Wawasan Kebangsaan. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sentosa.

Menurut Wan Usman Wawasan Kebangsaan “merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam”. Selain itu Kel. Kerja LEMHANAS (2001:14) mengatakan bahwa Wawasan Kebangsaan “merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. Pendapat lain menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN “Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional” pendapat lain “Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang cara

memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami jati diri suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup dalam lingkungan internal dan eksternal”.

Di samping itu bangkit pula gerakan-gerakan di bidang politik, ekonomi atau perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Dalam perjalanan sejarah itu timbul pula gagasan sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu merupakan perwujudan dari satu wawasan kebangsaan.

3.2 Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

- a) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- b) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu
- c) Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
- d) Demokrasi;
- e) Kesetiakawanan Sosial;
- f) Masyarakat adil-makmur.

Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan Kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan, bahwa wawasan kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu wawasan kebangsaan menegaskan, bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan persatuan bangsa yang kokoh. “Cinta akan Tanah Air dan Bangsa” menegaskan nilai sosial dasar. Dengan ini wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas

manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban azasi sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat pula berwawasan sempit. Fasisme, Naziisme sebagai nasionalisme yang sempit jelas ditolak oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan atau nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme atau Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari sejumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial, yang membangun dan

memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan dengan lebih mudah. Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan Kebangsaan Indonesia menegaskan, bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.

3.3 Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan Indonesia mengamatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu hendaknya dipupuk

penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada Tanah Air dan Bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.

Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan.

Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Misi yang diamanatkan ialah agar para warga negara Indonesia membina dengan jiwa besar dengan setia terhadap Tanah Air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta Tanah Air dan Bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antara ras, antar bangsa dan antar negara.

Mencermati makna Wawasan Kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakekatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.

Untuk dapat memahami hakekat wawasan kebangsaan Indonesia perlu kiranya dipahami jati diri bangsa kita dan untuk itu perlu pula dipahami

pandangan dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kalau kita teliti secara mendalam, maka asas pembangunan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan serta kaidah penuntun bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional tidak lain adalah penjabaran dari Pancasila.

Untuk dapat memahami bagaimana wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, perlu dipahami secara mendalam falsafah Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan suka berkoeksistensi dengan bangsa lain. Sudah sejak dulu kala bangsa Indonesia menikmati dan menghayati arti hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Dengan letak geostrategik nusantara di posisi silang hubungan antar bangsa, maka wawasan kebangsaan Indonesia tidak hanya bersifat "*inward looking*" dan mengisolasi diri. Laut bagi bangsa Indonesia bukan menjadi pemisah tetapi justru keluar sebagai wahana dalam berhubungan dengan bangsa lain, sedangkan ke dalam merupakan unsur pemersatu.

Wawasan nusantara yang mengemuka di tengah-tengah silang pendapat antara federalisme dan unitarisme di masa setelah lahirnya Indonesia Serikat, esensinya dapat dikatakan implementasi dari wawasan kebangsaan yang dijiwai semangat bangsa bahari. Dalam wawasan

nusantara dinyatakan bahwa wilayah laut adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang kemudian diakui dunia sebagai “*Archipelagic Principle*”.

Wawasan nusantara merupakan pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dipandang dari segala aspeknya. Wawasan nusantara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup:

1. Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kedaulatan nasional dengan segala kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia;
 - b. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, meyakini dan menganut berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu kesatuan bangsa yang utuh di dalam arti seluas-luasnya;
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki suatu tekad bulat dalam mencapai perwujudan cita-cita bangsa;

- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang dilandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
 - e. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan wilayah hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Kesatuan Sosial Budaya, dalam arti:
- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perikehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat perkembangan masyarakat yang sama, seimbang dan merata serta keselarasan hidup sesuai dengan kemajuan bangsa;
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam budaya menggambarkan kekayaan khazanah budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional secara keseluruhan yang dinikmati hasilnya oleh seluruh bangsa.
3. Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
- a. Bahwa kekayaan yang terdapat dan terkandung di dalam wilayah nusantara beserta kawasan yuridisnya, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air;

- b. Bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan Negara, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap sesuatu pulau atau daerah pada hakekatnya merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara;
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam kerangka menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam usaha pembelaan negara.

Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan nusantara pada satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaannya, sedangkan pada lain pihak menunjukkan wibawa kedaulatan negara Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi untuk tercapainya tujuan nasional.

B. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan studi yang akan dilakukan antara lain adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Dasim Budiansyah seorang ketua program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI Tahun 2010 dengan judul “Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Disekolah” deskriptif analisis pada guru dan siswa SMP, SMA, dan SMK. Tujuan penelitian tersebut hendak mengungkap sejumlah persoalan yang muncul di sekolah-sekolah seiring derasnya arus globalisasi menerpa para siswa melalui media massa televisi, bagaimana pengaruhnya terhadap kebiasaan mereka sehari-hari baik dalam belajar maupun mengisi waktu senggang, serta bagaimana program Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut. Penelitian dilakukan di dua wilayah di tanah air (Jawa Barat dan Batam) yang di asumsikan sangat deras terkena pengaruh globalisasi. Metode penelitian yang digunakan dua pendekatan, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yakni melalui metode survey. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa globalisasi menantang kekuatan penerapan unsur jati diri dan memporak-porandakan nilai-nilai adiluhung bangsa melalui agennya televisi dan media masaa lainnya. Untuk menanggulangi persoalan demikian maka program pendidikan kewarganegaraan harus diselenggarakan dengan mengacu pada konsep Citizenship Education.

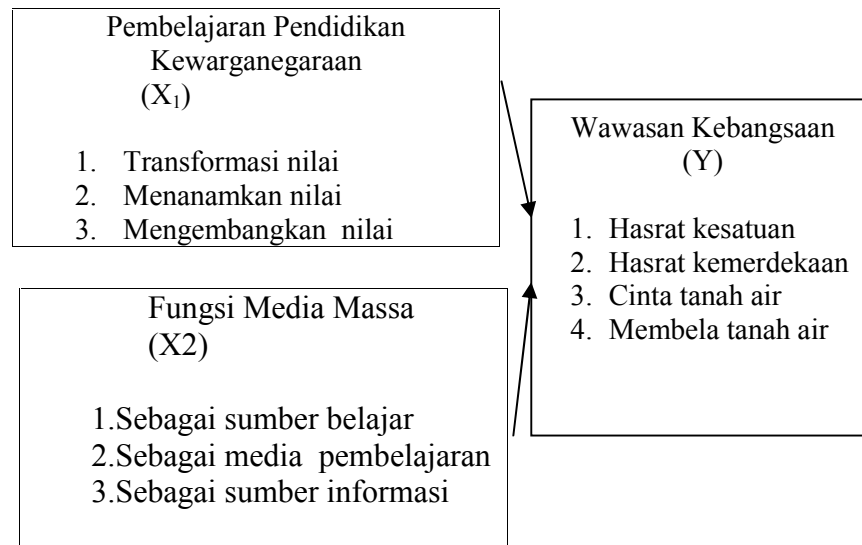
C. Kerangka Pikir

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Media massa merupakan media yang mampu menimbulkan keserempakan informasi diantara khalayak yang sedang memperhatikan pesan yang dilancarkan oleh media massa tersebut, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan Nasional.

Bedasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap wawasan kebangsaan siswa kelas XI di SMA Kemala Bhayangkari Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2012/2013.
2. Terdapat pengaruh antara fungsi media massaterhadap wawasan kebangsaan siswa kelas XI di SMA Kemala Bhayangkari Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2012/2013.